

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202224040, 11 April 2022

Pencipta

Nama : **B. A. Rukiyanto, SJ, F.X. Dapiyanta dkk**
Alamat : **Jl. Bener 20 Tegalrejo Yogyakarta, Yogyakarta, DI YOGYAKARTA, 55243**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Sentra HKI Universitas Sanata Dharma Yogyakarta**
Alamat : **JL. Affandi (Gejayan) Tromol Pos 29 Yogyakarta, Sleman, DI YOGYAKARTA, 55022**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Semakin Menjadi Manusiawi: Teologi Moral Masa Kini**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **20 Agustus 2014, di Yogyakarta**
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : 000339521

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	B. A. Rukiyanto, SJ	Jl. Bener 20 Tegalrejo Yogyakarta
2	F.X. Dapiyanta	Sidokarto RT02 RW 01 Purwomartani, Kalasan, Sleman
3	Yoseph Kristianto	Sonopakis Kidul RT 04 RW 28 No. 167 Ngestiharjo Kasihan Bantul
4	Ignatia Esti Sumarah	Perumahan Grasia 2 Blok A No. 3 Kadirojo 2 Kalasan Sleman





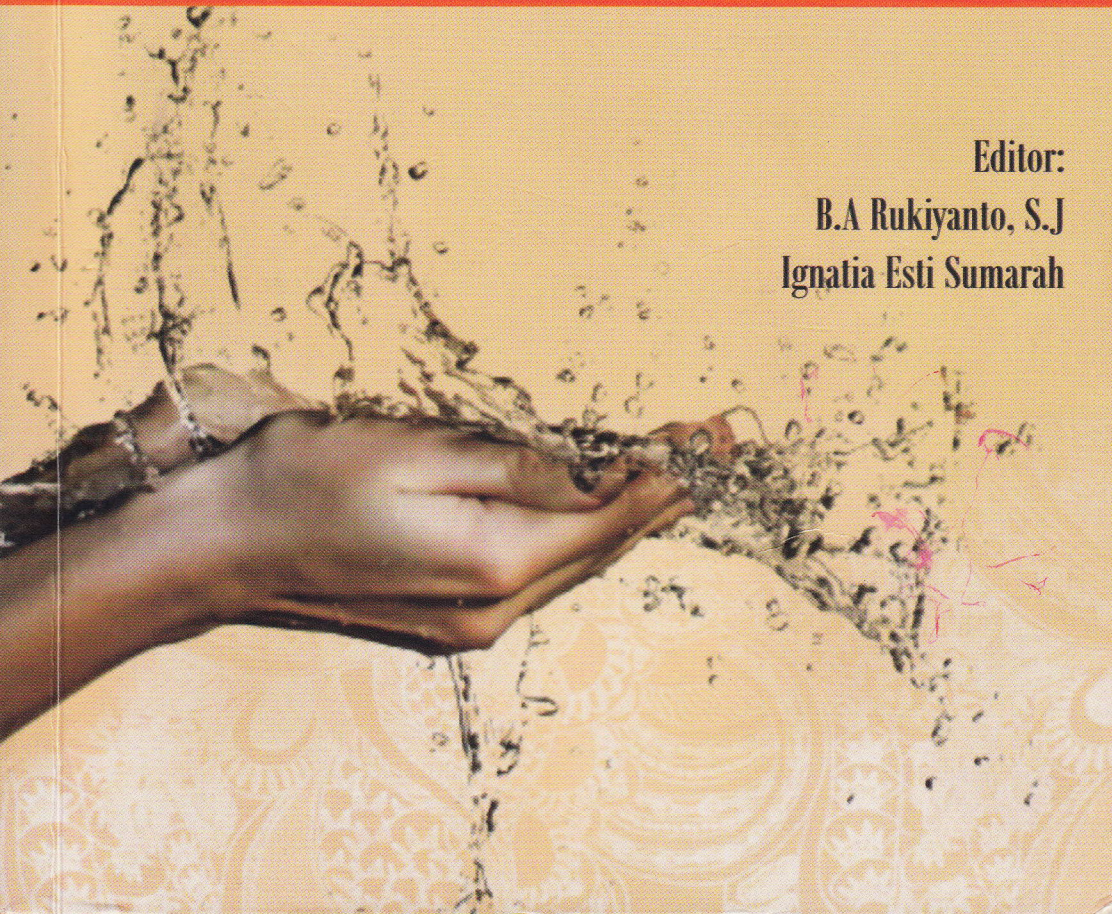
Semakin Menjadi
Manusia

Teologi Moral Masa Kini

Editor:

B.A Rukiyanto, S.J

Ignatia Esti Sumarah



Semakin Menjadi Manusiawi Teologi Moral Masa Kini

Editor:
B.A. Rukiyanto, SJ.
Ignatia Esti Sumarah



Penerbit
Universitas Sanata Dharma

Semakin Menjadi Manusiawi Teologi Moral Masa Kini

Copyright © 2014

• B.A. Rukiyanto, SJ. • Ignatia Esti Sumarah

MRK. Universitas Sanata Dharma

Jl. Gejayan Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 513301; 515253

Fax (0274) 562383

Diterbitkan oleh:

Penerbit Universitas Sanata Dharma

Jl. Affandi, Mrican, Tromos Pos 29

Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 513301, 515253;

Ext.1527/1513, Fax (0274) 562383

e-mail: *publisher@usd.ac.id*

:



Penerbit USD

Universitas Sanata Dharma
berlambangkan daun teratai coklat
bersudut lima dengan sebuah obor hitam
yang menyala merah, sebuah buku
terbuka dengan tulisan "*Ad Maiorem Dei
Gloriam*" dan tulisan "Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta" berwarna hitam
di dalamnya. Adapun artinya sebagai
berikut.

Teratai: kemuliaan dan sudut lima:
Pancasila; Obor: hidup dengan semangat
yang menyala-nyala; Buku yang
terbuka: ilmu pengetahuan yang selalu
berkembang; Teratai warna coklat: sikap
dewasa yang matang; "*Ad Maiorem Dei
Gloriam*": demi kemuliaan Allah yang
lebih besar.

Kontributor:

- F.X. Dapiyanto
- Ignatia Esti Sumarah
- Yoseph Kristianto
- B.A. Rukiyanto, SJ.

Desain Sampul:

Patria Untoro

Tata Letak:

Thoms

Cetakan Pertama:

ix, 160 hlm.; 148 x 210 mm.

ISBN: 978-602-9187-76-2

EAN: 9-786029-187762

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Matakuliah moral merupakan matakuliah yang penting untuk mengembangkan watak dan kepribadian seseorang, menumbuhkan nilai-nilai moral seperti: cinta kasih, kebaikan, kejujuran, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab. Dengan mendalami moralitas Katolik, diharapkan seseorang dapat bertindak secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengikuti suara hatinya sesuai dengan ajaran Katolik sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang baik.

Mengingat pentingnya pendidikan moral Katolik, buku Teologi Moral Katolik ini disusun sebagai pegangan bagi para mahasiswa untuk mendalami Moral Katolik. Selain itu, buku ini juga dapat dipergunakan oleh siapa pun yang berminat mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana moral Katolik itu dikembangkan dalam hidup.

Buku ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama ditulis oleh Dapiyanta yang membahas moral dasar. Dalam bagian ini Dapiyanta menguraikan tentang "Tindakan Bermoral." Manusia perlu memahami makna tindakan bermoral secara umum, yakni tindakan yang disebut baik atau buruk. Tindakan manusia disebut baik jika secara subjektif menaati hati nurani dan secara objektif menaati norma. Manusia yang menaati norma dengan sadar lebih baik daripada yang terpaksa menaati norma. Manusia dapat dituntut tanggung jawab jika dalam tindakannya ada kesadaran dan kebebasan. Dalam berbagai pilihan dari kebebasannya oleh karena situasi, entah sadar atau tidak, orang sudah memiliki pilihan dasar dalam hidupnya atau yang disebut *optio fundamentalis*. Baik-buruknya tindakan seseorang dipengaruhi juga oleh pilihan dasar dari orang tersebut.

Bagian kedua ditulis oleh Esti Sumarah tentang “Moral Hidup: Membentuk Sikap Hormat terhadap Kehidupan.” Dalam bagian ini diajarkan tentang pentingnya merawat kehidupan di setiap tahapan dan transisi hidup yang dialami manusia sepanjang usianya. Sikap hormat terhadap hidup pada *tahap awal mula kehidupan* perlu terinternalisasi dalam diri manusia, sehingga tidak akan melakukan pembunuhan, aborsi, *euthanasia* dan bunuh diri; karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Kesadaran untuk memelihara kesehatan fisik dan psikologis juga perlu dilakukannya pada *tahap tengah perjalanan hidup*. Kesehatan fisik diupayakan dengan menghindari pemakaian obat-obat bius, penyalahgunaan makanan, alkohol, tembakau, dan obat-obatan lainnya. Sedangkan kesehatan psikologis dilakukan dengan kesediaan untuk terus-menerus mengolah emosi negatif supaya menjadi emosi positif agar manusia sanggup merasakan kebahagiaan hidup. Pembahasan tentang *tahap akhir hidup manusia* menyadarkan orang tentang pentingnya mempersiapkan diri memasuki usia tua, rentan menjadi sakit-sakitan, juga siap menghadapi fakta kematian.

Bagian ketiga merupakan buah pemikiran Kristianto tentang “Hidup Berkeluarga: Sebuah Pilihan yang Menuntut Tanggung Jawab.” Dalam bagian ini dibahas tentang paham pernikahan menurut tradisi Katolik yang harus dihayati sebagai panggilan suci karena persekutuan hidup dan kasih suami-isteri tersebut dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Melalui perkawinan, manusia dipanggil membangun keluarga sebagai tanda keikutsertaannya dalam karya Allah demi melanjutkan dan mengembangkan kehidupan. Jadi hidup berkeluarga perlu dipahami sebagai suatu pilihan bebas manusia dalam rangka menanggapi panggilan kudus Allah yang harus dipertanggungjawabkannya dengan mengindahkan prinsip-prinsip hidup berkeluarga Katolik, yang meliputi: 1) Hakikat Hidup Berkeluarga, 2) Cinta Kasih sebagai Dasar, Semangat dan Tujuan

Perkawinan, serta 3) Ciri-ciri dan Peranan Keluarga Kristiani. 4) Persoalan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bagian keempat tentang “Moral Sosial,” ditulis oleh Rukiyanto. Bagian ini membahas bentuk keterlibatan Gereja di dalam permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Gereja merasa prihatin dengan ketidakadilan yang terjadi dan ikut berjuang untuk membela orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Gereja mengeluarkan ajaran sosialnya untuk menanggapi permasalahan-permasalahan sosial itu. Inti ajaran sosial Gereja dibahas satu per satu di dalam artikel ini; begitu juga prinsip-prinsip moral yang mendasari Gereja untuk menyumbangkan gagasan dan pemikiran untuk bersama-sama membangun masyarakat yang lebih adil demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan kerja manusia juga dibahas dalam bagian ini. Semua ajaran dan usaha Gereja itu bertujuan untuk membangun peradaban cinta kasih demi terwujudnya Kerajaan Allah di dunia ini.

Bagian kelima mengulas “Anti Korupsi dalam Perspektif Moral Katolik,” sebagai buah pemikiran Esti Sumarah. Bagian ini diawali dengan pelbagai contoh tindakan korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Akar dari perilaku korup semata-mata karena keserakahan atau kerakusan (*greed*) manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya (seperti mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang salah). Moral Katolik menegaskan pentingnya manusia bersikap anti korupsi sebagai salah satu wujud dari kualitas moral yang dewasa atau otonom (*self-rule/self-governing*). Orang yang mempunyai otonomi moral tidak akan mengikuti sembarang desakan keinginan dan kebutuhan.

Bagian keenam Esti Sumarah membahas “Moral Lingkungan Hidup: Pentingnya Merawat Lingkungan.” Bagian ini mengulas penyebab terjadinya krisis ekologis dan alasan mengapa manusia memiliki perilaku-perilaku yang merusak alam. Esti Sumarah

kemudian memaparkan beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan manusia yang memiliki kesadaran, komitmen, peduli dan tanggap memelihara lingkungan sekitar demi menjaga keutuhan ciptaan-Nya.

Bagian ketujuh berjudul “Semakin Menjadi Manusiawi” ditulis oleh Rukiyanto. Bagian ini menutup tulisan-tulisan dalam buku ini sebagai ajakan untuk semakin menjadi manusiawi. Pemahaman bahwa kita semua ikut terlibat di dalam membuat situasi kurang manusiawi menyadarkan jika kita semua ikut bertanggung jawab, kita semua ikut berdosa. Kedosaan membuat kita melalaikan hati nurani, kurang menghormati kehidupan, kurang menghargai keluarga, kurang mau peduli terhadap orang yang mengalami ketidakadilan. Bisa jadi kita juga mendukung budaya korupsi di dalam masyarakat atau ikut serta merusak lingkungan hidup kita. Bertitik tolak dari kesadaran akan kedosaan-kedosaan itu, diharapkan orang mulai bertindak untuk ikut serta membangun kehidupan yang lebih baik dan menghindari hal-hal yang merusak kehidupan. Itulah pertobatan. Di dalam Gereja Katolik, pertobatan disempurnakan di dalam Sakramen Tobat, kesempatan bagi orang untuk kembali berdamai dengan Tuhan, dengan Gereja, dengan sesama dan dengan lingkungan hidup.

Demikianlah, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan sumbangan sekaligus inspirasi bagi para pembaca untuk dapat mengembangkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan bermasyarakat agar semakin terwujud kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kami sebagai penyunting mengucapkan banyak terima kasih kepada para kolega yang sudah menyumbangkan tulisannya untuk buku ini, khususnya kepada: Bapak Teguh Dalyono ketua MPK USD yang telah memberi restu atas penulisan buku ini, Romo Ignatius Loyola Madya Utama SJ yang telah memberi beberapa saran kepada para penulis, Patria Untoro yang membuat ilustrasi cover buku ini, Thomas A.H.M yang membantu

proses layout buku ini. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Penerbit Universitas Sanata Dharma yang berkenan menerbitkan buku ini.

Yogyakarta, Januari 2014

B.A. Rukiyanto, S.J.

Ignatia Esti Sumarah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor	iii
Tindakan Bermoral	1
<i>F.X. Dapiyanta</i>	
Moral Hidup:	
Membentuk Sikap Hormat terhadap Kehidupan	29
<i>Ignatia Esti Sumarah</i>	
Hidup Berkeluarga:	
Sebuah Pilihan yang Menuntut Tanggung Jawab	51
<i>Yoseph Kristianto</i>	
Moral Sosial	79
<i>B.A. Rukiyanto, S.J.</i>	
Anti Korupsi dalam Perspektif Moral Katolik	103
<i>Ignatia Esti Sumarah</i>	
Moral Lingkungan Hidup:	
Pentingnya Merawat Lingkungan	117
<i>Ignatia Esti Sumarah</i>	
Menjadi Semakin Manusiawi	133
<i>B.A. Rukiyanto, S.J.</i>	
Biodata Penulis	157

MORAL SOSIAL

B.A. Rukiyanto, S.J.

A. PENDAHULUAN

Gereja mempunyai tugas untukewartakan Sabda dan dihidupi oleh Sang Sabda itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebagai pelayan Sabda, Gereja mempunyai tugas untuk membuat Sang Sabda hadir, membuat karya keselamatan Allah menjadi konkret dan nyata di dunia, mengubah dunia sebagaimana dikehendaki oleh Allah sendiri (Aman, 2006: 7).

Kristus datang untukewartakan Kerajaan Allah. Gereja tidak identik dengan Kerajaan Allah. Gereja merupakan sakramen Kerajaan Allah (Rahner, 1986: 239). Gereja merupakan benih dan awal mula Kerajaan itu di dunia (*Lumen Gentium* 5). Gereja diutus oleh Kristus sendiri untuk melanjutkan ewartakan Kerajaan Allah itu. Gereja berharap agar Kerajaan itu semakin berkembang menuju kepada kesempurnaan.

Untuk mengembangkan Kerajaan Allah di dunia ini, Gereja perlu terlibat di dalam masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Secara khusus, Gereja di Indonesia perlu memperjuangkan nasib puluhan juta orang yang hidup dalam kemiskinan akibat struktur-struktur masyarakat yang tidak adil. Umat Katolik perlu bekerja sama dengan umat beragama lain untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, persaudaraan dan cinta kasih, yang merupakan nilai-nilai Kerajaan Allah, serta menciptakan kesejahteraan yang merupakan realisasi awal Kerajaan Allah (bdk. Hardawiryana, 1992: 64).

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar dan tujuan keterlibatan sosial Gereja, serta gambaran umum isi ajaran sosial Gereja.

B. GEREJA DAN KETERLIBATAN SOSIAL

Gereja sebagai komunitas moral merupakan realitas sosial yang kelihatan di dunia (*Gaudium et Spes* 44) sekaligus membawa dalam dirinya realitas yang tidak kelihatan sebagai sakramen keselamatan bagi seluruh dunia dan umat manusia (LG 1). Dengan demikian Gereja ada bukan untuk dirinya, melainkan untuk dunia dan seluruh umat manusia. Gereja menawarkan kekayaan spiritualnya kepada dunia denganewartakan Kabar Gembira, memberikan pelayanan sakramen-sakramen, maupun pelayanan pastoral di bidang sosial, politik dan budaya (Aman, 2006: 18-20).

Gereja ambil bagian di dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita (bdk. GS 1). Oleh karena itu Gereja bertugas untuk membawa kabar baik tentang Kerajaan Allah, yang telah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Gereja merupakan sakramen cinta kasih Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia, sehingga Gereja dapat memberikan harapan dan mengilhami serta menopang setiap usaha demi pembebasan dan kemajuan manusia (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 41-42).

Berkaitan dengan tugas perutusan Gereja untuk memperjuangkan pembebasan dan kemajuan manusia, Gereja mengeluarkan ajaran sosial sebagai pedoman bagi seluruh umat beriman dalam usaha untuk merealisasikan tugas perutusan Gereja itu. Bagian berikut akan menjelaskan apa itu Ajaran Sosial Gereja.

C. AJARAN SOSIAL GEREJA

Ajaran sosial Gereja merupakan perumusan hasil-hasil refleksi tentang kenyataan-kenyataan hidup manusiawi dalam masyarakat maupun dalam tatanan internasional, dalam terang

iman dan tradisi Gereja. Ajaran itu bermaksud menafsirkan kenyataan-kenyataan itu berdasarkan ajaran Injil tentang manusia dan panggilannya agar dapat menjadi tuntunan bagi umat dalam bersikap dan bertindak. Maka ajaran sosial Gereja bercorak teologis, khususnya teologi moral, karena ajaran itu merupakan pedoman-pedoman untuk bertindak, baik perorangan maupun keluarga atau komunitas, bagi para tokoh masyarakat, tokoh politik, maupun para pemimpin negara (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 49-50).

Melalui ajaran sosialnya Gereja ikut serta membangun kehidupan manusia di tengah masyarakat berdasarkan keadilan dan cinta kasih demi perlindungan dan kemajuan pribadi manusia. Dalam hal ini ajaran sosial Gereja mempunyai tugasewartakan sekaligus mencela: mewartakan ajaran Gereja tentang manusia beserta hal-hwalnya dalam keseluruhannya untuk membentuk hati nurani; mencela segala bentuk ketidakadilan dan tindak kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 55-56). Gereja membela hak-hak manusia yang dilecehkan, khususnya hak-hak kaum miskin, kaum kecil dan kaum lemah. Gereja bertugas untuk ikut serta mewujudkan keadilan sosial.

Dasar dari ajaran sosial Gereja adalah Kitab Suci dan tradisi Gereja. Melalui kedua sumber itu, Gereja menimba ilham dan terang ilahi untuk memahami, menilai dan membimbing manusia sebagaimana dikehendaki Allah. Di samping itu, untuk dapat menafsirkan kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat secara tepat, ajaran sosial Gereja terbuka terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan, khususnya filsafat dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Berkat ilmu-ilmu pengetahuan itu, Gereja dapat memahami manusia di dalam masyarakat dengan lebih baik, dapat mewartakan kebenaran dengan lebih meyakinkan, dan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 50-53).

Di bawah ini akan diberikan sekilas gambaran dokumen-dokumen ajaran sosial Gereja sejak terbitnya Rerum Novarum sebagai ensiklik sosial yang pertama.

1. *Rerum Novarum* (Kondisi Kerja)

Rerum Novarum (RN) merupakan Ensiklik pertama ajaran sosial Gereja, dikeluarkan oleh Paus Leo XIII pada tahun 1891. Adanya Revolusi Industri mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang hebat pada kaum buruh dan kemerosotan moral. Industri berkembang pesat, mengubah pola hidup bermasyarakat, dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri. Namun ternyata, masyarakat tidak menjadi lebih makmur, para buruh mendapat perlakuan buruk. Mereka diperas, dipaksa bekerja keras dengan upah yang tidak layak. Mereka mendapat perlakuan yang tidak adil, sehingga jatuh dalam kemiskinan yang luar biasa. Tidak ada perlindungan dari negara dan pemilik modal. Akibatnya terjadi jurang yang besar antara golongan kaya dan golongan miskin.

Untuk menanggapi situasi ini, Ensiklik RN memberi perhatian pada kondisi kerja dan nasib kaum buruh. Ensiklik RN melihat adanya masalah-masalah sosial secara struktural dan menekankan prinsip keadilan universal sebagai titik tolak untuk memerangnya. Melalui Ensiklik RN, Gereja menanggapi masalah-masalah ketidakadilan struktural ini dan membela martabat manusia, secara konkret hak-hak kaum buruh. Antara kaum buruh dan pemilik modal tidak harus ada pertentangan yang mendasar, tetapi perlu diusahakan kerja sama. Masalah sosial diselesaikan tidak dengan pertentangan kelas, tetapi dengan mengusahakan agar masing-masing menjalankan kewajibannya dan setiap orang mendapat haknya. Kaum buruh menjalankan kewajiban mereka menurut kontrak kerja, sedangkan kaum pemilik modal tidak memperlakukan buruh sebagai budak, dan memberikan upah yang cukup untuk hidup layak. Negara yang bertanggung jawab atas kepentingan umum, wajib bercampur tangan dalam

masalah sosial demi kepentingan kaum buruh, yang perlu diberi kesempatan untuk menabung hasil kerja mereka sebagai milik pribadi, dan diberi hak untuk membentuk serikat pekerja guna memperjuangkan hak-hak mereka, jika perlu melalui pemogokan (Kieser, 1992: 192-193). Keadilan merupakan tuntutan moral yang perlu diusahakan oleh semua pihak yang terlibat dalam masalah buruh. Keadilan akan terwujud kalau setiap orang menjalankan kewajibannya. Gereja juga mempunyai tugas untuk membangun keadilan sosial.

2. *Quadragesimo Anno* (Sesudah 40 tahun)

Quadragesimo Anno (QA) dikeluarkan oleh Paus Pius XI pada tahun 1931, membahas “Rekonstruksi Tatanan Sosial.” Ensiklik ini memperingati 40 tahun Ensiklik *Rerum Novarum*, melanjutkan pembahasan tentang pemerdekaan kaum buruh (Kieser, 1992: 193-195). Demi keadilan perlu diciptakan tata kehidupan bersama yang adil. Hak milik mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk menunjang hidup setiap orang. Maka hasil kerja harus dibagikan secara adil, sesuai dengan kepentingan umum. Upah adil diukur menurut kebutuhan buruh beserta keluarganya dan kemampuan perusahaan. Menabung membuat buruh makin merdeka.

Ensiklik ini mempunyai tujuan membangun masyarakat yang mengatasi pertentangan kelas antara kaum buruh dan para pemilik modal, karena dalam masyarakat industri mereka saling membutuhkan. Dengan demikian masyarakat harus dibangun dengan menghargai berbagai macam kepentingan. Dibutuhkan kerja sama antara kaum buruh dan para pemilik modal serta perlu diusahakan tercapainya keseimbangan kepentingan. Maka ditekankan pentingnya prinsip-prinsip solidaritas: kita dapat hidup secara manusiawi dalam kebersamaan, maka setiap orang bertanggung jawab atas kebersamaan supaya kehidupan dapat berlangsung terus.

Ensiklik ini juga memperkenalkan prinsip “subsidiaritas,” yaitu prinsip bahwa apa yang dapat dikerjakan oleh manusia perorangan atau kelompok kecil, masyarakat tidak boleh mengambil alih. Setiap usaha kemasyarakatan bersifat subsidier, yaitu mendukung anggota-anggota masyarakat, bukan menghancurkannya.

Komunisme ditolak karena menghilangkan hak-hak pribadi. Begitu pula kapitalisme yang menindas dikritik. Kemerdekaan dan hormat bagi martabat pribadi kaum buruh diperjuangkan. Keadilan akan tercapai di dalam masyarakat yang diperbarui dengan membenahi tatanan sosial hidup bersama. Semua pihak diharapkan terlibat di dalam kepentingan bersama.

3. *Mater et Magistra* (Kristianitas dan Kemajuan Sosial)

Ensiklik *Mater et Magistra* dikeluarkan oleh Beato Paus Yohanes XXIII pada tahun 1961, untuk memperingati 70 tahun Ensiklik *Rerum Novarum*, melanjutkan pembahasan masalah buruh. Di samping itu dimunculkan pula masalah kependudukan dan masalah-masalah negara-negara non-industri di dunia ketiga. Tidak seperti Ensiklik *Rerum Novarum* dan *Quadragesimo Anno* yang ditujukan kepada para uskup dan teolog, para ahli etika, ilmu sosial dan ekonomi, Ensiklik ini ditujukan kepada semua orang Kristiani. Paus Yohanes XXIII ingin berbicara sebagai sesama manusia mengenai masalah-masalah kemanusiaan. Ajaran sosial Gereja diungkapkan sebagai bagian integral dari ajaran Kristiani mengenai manusia. Paus Yohanes mulai mendialogkan kaitan antara pelayanan iman dan perjuangan demi keadilan. Keselamatan dan keperluan hidup, kesejahteraan dan kesucian jiwa menjadi tugas dan perhatian Gereja (Kieser, 1992: 196-197).

Ensiklik ini melihat jurang antara golongan kaya dan miskin tidak hanya merupakan permasalahan antara pemilik modal dan kaum buruh, tetapi sudah merambah ke masalah internasional. Ada jurang yang besar antara negara-negara kaya dan negara-

negara miskin. Kemiskinan di Asia, Afrika, dan Latin Amerika merupakan produk dari sistem tata dunia yang tidak adil. Maka dibahas pula masalah kerjasama antarnegara dan perlunya bantuan internasional bagi negara-negara miskin (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

Dalam Ensiklik ini diperkenalkan metode ajaran sosial Gereja, yaitu *see, judge, and act*, metode refleksi yang mengajak orang untuk melihat situasi, merefleksikannya, supaya dapat menemukan tindakan yang tepat untuk menanggapinya. Gereja terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil.

4. *Pacem in Terris* (Damai di Bumi)

Ensiklik *Pacem in Terris* dikeluarkan oleh Beato Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963, membahas masalah perdamaian dunia di tengah-tengah zaman yang ditandai dengan perlombaan senjata nuklir. Ensiklik ini ditujukan kepada umat Kristiani dan “semua orang yang berkehendak baik.” Untuk pertama kalinya dokumen Gereja ditujukan bagi semua orang (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 66-67).

Perdamaian akan tercapai jika ada tatanan yang adil yang mengedepankan hak-hak manusia dan keluhuran martabatnya. Tatanan hidup di sini mencakup tatanan relasi (1) antarmasyarakat, (2) antara masyarakat dan negara, (3) antarnegara, (4) antara masyarakat dan negara-negara dalam tingkat komunitas dunia. Ensiklik ini menyerukan dihentikannya perang dan perlombaan senjata serta pentingnya memperkuat hubungan internasional lewat lembaga Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

5. *Gaudium et Spes* (Gereja di Tengah Dunia Modern)

Konsili Vatikan II (1962-1965) merupakan tonggak pembaruan hidup Gereja Katolik. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* (GS) merupakan tanggapan Gereja terhadap berbagai harapan dan

kerinduan dunia modern. “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga” (GS 1). Dokumen ini mengajak umat Kristiani untuk menjadi saksi kehadiran Allah di dunia ini. Gereja menyatu dengan umat manusia dan sejarahnya, bersama dengan dunia mengalami nasib keduniaan yang sama, sekaligus menjadi raga bagi masyarakat yang harus dibarui dalam Kristus dan diubah menjadi keluarga Allah (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 67-68).

Gereja terbuka terhadap dunia, membuka cakrawala baru dengan cara “membaca tanda-tanda zaman.” Gereja ikut memperhatikan masalah-masalah dunia, seperti kebudayaan, kehidupan ekonomi dan sosial, perkawinan dan keluarga, masyarakat politik, perdamaian, dan masyarakat bangsa-bangsa dengan pendekatan antropologi Kristiani dan dalam terang tugas perutusan Gereja. Pribadi manusia menjadi titik tolak untuk mengkaji segala sesuatu. Masyarakat, struktur-strukturnya dan perkembangannya diarahkan kepada pertumbuhan pribadi manusia. Gereja berdialog dengan dunia, mempunyai keprihatinan terhadap berbagai macam segi kehidupan Kristiani, yaitu perubahan sosial, psikologis, politik, ekonomi, moral dan religius.

6. *Populorum Progressio* (Perkembangan Bangsa-bangsa)

Ensiklik *Populorum Progressio* dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1967. Perkembangan bangsa-bangsa merupakan tema utama dari Ensiklik ini. *Populorum Progressio* mengemukakan paham tentang pembangunan terpadu manusia dan perkembangan dalam solidaritas seluruh umat manusia. Ensiklik ini membuka wawasan bagi masalah-masalah seluas dunia. Masalah sosial tidak terbatas pada lingkungan masyarakat. Kesenjangan antara negara-negara industri dan negara-negara bekas koloni yang terbelakang menjadi perhatian Ensiklik ini (Kieser, 1992: 198-199). Kekayaan

dari sebagian negara-negara maju harus dibagi untuk memajukan negara-negara yang miskin.

Paus Paulus VI mengemukakan visi baru, bahwa perkembangan ekonomi dan sosial hanyalah sebagian dari perkembangan manusia seluruhnya. Orang diajak untuk terlibat di dalam politik perkembangan seluas dunia, dengan catatan bahwa perkembangan sejati hanya terjadi kalau merupakan perkembangan integral dari pribadi manusia seluruhnya, kemerdekaan dan martabat manusia dihormati dan terarah pada tujuan abadi. Pembangunan perlu menciptakan kondisi kerja yang manusiawi, bukan seperti semangat kapitalisme liberal. Pembangunan ekonomi harus seirama dengan perkembangan sosial dan politik. Keunikan setiap bangsa dan kebudayaan harus dihargai.

7. *Octogesima Adveniens* (Panggilan untuk Bertindak)

Surat apostolik *Octogesima Adveniens* dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1971 untuk memperingati *Rerum Novarum* yang ke-80 tahun. Paulus VI menyerukan kepada segenap anggota Gereja dan seluruh umat manusia untuk terus memerangi kemiskinan. Urbanisasi menyebabkan lahirnya “kemiskinan baru”, seperti orang tua, orang cacat, kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, dst. Dimunculkan pula masalah-masalah diskriminasi warna kulit, asal usul, budaya, seks, dan agama. Gereja mendorong umatnya untuk ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak untuk memperjuangkan nilai-nilai dan semangat injili, memperjuangkan keadilan sosial (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

8. *Iustitia in Mundo* (Keadilan di Dunia)

Dokumen ini dikeluarkan oleh Sinode para Uskup sedunia pada tahun 1971. Untuk pertama kalinya sinode para uskup menaruh perhatian pada masalah keadilan. Para uskup menegaskan bahwa misi Gereja dan keadilan merupakan dua unsur yang tidak bisa

dipisahkan. Keadilan merupakan dimensi konstitutif pewartaan Injil. Misi Gereja yang mengabaikan usaha nyata dan tegas untuk memperjuangkan keadilan, tidaklah lengkap. Gereja wajib hadir di tengah-tengah kaum miskin. Misi Kristus dalamewartakan datangnya Kerajaan Allah pun mencakup tercapainya keadilan. Dokumen ini terinspirasi oleh perjuangan keadilan dari Gereja-Gereja di Afrika, Asia, dan Latin Amerika. Tema “pembebasan” yang diusung oleh para uskup Amerika Latin di Medellin (Kolumbia) tahun 1968 ikut berpengaruh bagi terbentuknya dokumen ini (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

9. *Evangelii Nuntiandi* (Evangelisasi di Dunia Modern)

Anjuran Apostolik *Evangelii Nuntiandi* dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1975 dalam rangka memperingati Konsili Vatikan II yang ke-10. Arah dasar dari dokumen ini adalah agar Gereja dalam pewartaannya tetap dapat menyapa manusia pada zaman modern ini. Paulus VI mengajukan tiga pertanyaan dasar: (1) Sabda Tuhan itu berdaya, menyentuh hati manusia, tetapi mengapa Gereja dewasa ini menjumpai hidup manusia yang tidak disentuh oleh Sabda Tuhan? (2) Dalam arti apakah kekuatan evangelisasi sungguh-sungguh mampu mengubah manusia dalam abad ini? (3) Metode-metode apakah yang harus digunakan agar kekuatan Sabda sungguh menemukan efeknya? Yesus Kristusewartakan keselamatan sekaligusewartakan pembebasan. Gereja melanjutkan tugas pewartaan Yesus itu. Pewartaan Injil sekaligus harus membebaskan pula (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>). Pewartaan pertama-tama ditunjukkan oleh kesaksian hidup pelaku pewartaan, yang dibuktikan oleh pertobatannya sendiri. Pewartaan harus dapat mengubah masyarakat dari dalam dan membaruinya.

10. *Laborem Exercens* (Kerja Manusia)

Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1979. Pusat perhatian ensiklik ini adalah “manusia bekerja.” Keluhuran martabat manusia ditemukan di dalam kerja. Kerja itu bersifat manusiawi. Manusia berhak bekerja demi kelangsungan hidupnya. Ensiklik ini mengkritik komunisme dan kapitalisme yang memperlakukan manusia sebagai alat produksi saja. Manusia hanya dilihat sebagai alat penghasil kemajuan dan perkembangan. Manusia berhak bekerja, berhak atas upah yang adil, sekaligus berhak untuk hidup secara lebih manusiawi dengan kerjanya (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

11. *Sollicitudo Rei Socialis* (Keprihatinan Sosial)

Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-20 Ensiklik *Populorum Progressio*. Jurang antara negara-negara miskin dan negara-negara kaya semakin besar. Perkembangan dan kemajuan di suatu wilayah sering kali berarti pemiskinan di wilayah lain. Persoalan lain muncul, yaitu pertentangan ideologis antara Barat dan Timur, antara kapitalisme dan komunisme. Pertentangan ini semakin menghambat kerjasama dan solidaritas kepada yang miskin. Negara-negara Barat semakin membabi buta dalam eksplorasi kemajuan. Sebaliknya negara-negara miskin semakin terpuruk oleh kemiskinannya (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

Ensiklik ini membahas juga “dosa struktural.” Struktur-struktur dosa dibicarakan untuk menyadarkan orang bahwa perkembangan manusia hanya dapat diselesaikan dengan perubahan mentalitas untuk memperbaiki hubungan antarmanusia dan membarui masyarakat. Untuk diperlukan solidaritas, yang diartikan sebagai tekad untuk melibatkan diri demi kesejahteraan umum, demi kepentingan semua orang, karena kita bertanggung jawab atas semua orang. Keserakahan menghalangi perkembangan

manusia yang penuh. Struktur-struktur dosa ini dapat diatasi dengan mengubah sikap dasar (pertobatan), yaitu rela “kehilangan diri” demi orang lain, bukannya mengeksploitasi dia, melayani, bukannya menindas orang demi keuntungan sendiri (Kieser, 1992: 202-203). Mental baru yang mengutamakan manusia di atas barang dikonkretkan dengan mengutamakan orang miskin.

12. *Centesimus Annus* (Tahun Keseratus)

Ensiklik *Centesimus Annus* dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1991 untuk memperingati ulang tahun Ensiklik *Rerum Novarum* yang ke-100. Ensiklik ini menegaskan kembali pokok-pokok gagasan dalam Ensiklik *Rerum Novarum* yang tetap aktual untuk dunia saat ini. Jatuhnya komunisme dan sosialisme di Eropa Timur yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 menunjukkan suatu periode baru. Jatuhnya sosialisme tidak berarti bahwa kapitalisme dan liberalisme lebih baik. Kesalahan utama dari sosialisme ialah tidak adanya dasar yang lebih manusiawi atas perkembangan. Martabat dan tanggung jawab pribadi manusia dilalaikan. Di lain pihak, kapitalisme bukanlah pilihan yang tepat pula. Perkembangan yang mengedepankan eksplorasi kebebasan akan memunculkan ketidakadilan. *Centesimus Annus* membahas pula masalah lingkungan hidup (Armada Riyanto dalam <http://www.imankatolik.or.id>).

D. PRINSIP-PRINSIP AJARAN SOSIAL GEREJA

Dalam bagian ini akan diuraikan prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja, yang merupakan inti ajaran sosial Katolik, ungkapan tentang seluruh kebenaran mengenai manusia yang diketahui oleh akal budi dan iman (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 109-111). Prinsip-prinsip ini merupakan perjumpaan antara perintah utama Injil mengasihi Allah dan sesama dalam keadilan dengan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini perlu dilihat sebagai satu-

kesatuan dan dalam saling keterkaitan satu sama lain, mempunyai makna moral yang mendasar karena merujuk pada dasar-dasar terakhir dan organisasional dari kehidupan di dalam masyarakat.

Ada tujuh prinsip: (1) martabat pribadi manusia; (2) prinsip kesejahteraan umum; (3) tujuan universal harta benda; (4) prinsip subsidiaritas; (5) keterlibatan; (6) prinsip solidaritas; (7) dan nilai-nilai dasar kehidupan sosial.

1. Martabat Pribadi Manusia

Gereja melihat dalam diri setiap manusia citra Allah sendiri yang menemukan kepenuhan dirinya di dalam Yesus Kristus, puncak wahyu Allah. Dengan demikian setiap manusia mempunyai martabat yang harus dihormati. Seluruh ajaran sosial Gereja menghormati martabat pribadi manusia. Masyarakat yang adil dapat tercapai apabila didasarkan pada martabat pribadi manusia. Maka hak-hak asasi manusia harus dibela baik secara pribadi maupun sebagai keseluruhan (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 73-75, 89, 105).

2. Prinsip Kesejahteraan Umum

Prinsip kesejahteraan umum berasal dari martabat, kesatuan dan kesetaraan semua orang. Kesejahteraan umum merupakan “keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri” (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 112).

Setiap pribadi manusia tidak dapat terlepas dari pribadi yang lain. Ia berada “bersama” yang lain dan “untuk” yang lain. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum hanya dapat dicapai dan ditingkatkan secara bersama-sama.

Tuntutan-tuntutan menyangkut kesejahteraan umum bergantung pada kondisi-kondisi sosial dan terkait dengan

pernghormatan terhadap pribadi manusia dan hak-hak asasinya. Tuntutan-tuntutan ini terutama berkaitan dengan komitmen pada perdamaian, penataan kekuasaan negara, sistem peradilan yang sehat, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan penyediaan berbagai pelayanan yang pokok bagi semua orang, seperti makanan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kebebasan berbicara dan kebebasan beragama (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 113-115).

Tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan umum terletak pada masing-masing pribadi, sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah, karena kesejahteraan umum merupakan alasan dan tujuan adanya kekuasaan politik. Maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dengan tuntutan keadilan.

3. Tujuan Universal Harta Benda

Tujuan universal harta benda adalah untuk perkembangan pribadi sepenuhnya dan untuk kesejahteraan umum. Allah menghendaki supaya bumi dan segala isinya digunakan oleh semua orang (GS 69). Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia sebagai sumber kehidupan bagi semua orang. Maka setiap orang berhak memiliki akses kepada kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk hidup dan mencapai perkembangan sepenuhnya (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 116-125).

Hak milik pribadi tetap mempunyai fungsi sosial karena kaitannya dengan kesejahteraan umum. Maka setiap orang tidak boleh menggunakan sumber-sumber dayanya tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penggunaannya, tetapi sebaliknya ia harus bertindak sedemikian rupa sehingga keuntungan-keuntungannya tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga demi kesejahteraan umum.

Adanya tanggung jawab sosial itu mewajibkan orang untuk memperhatikan dan mengutamakan kaum miskin dan tersingkir. Kalau kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kaum miskin, sebenarnya kita memberi apa yang menjadi hak mereka, bukan hak kita. Kita sebenarnya membayar utang keadilan.

4. Prinsip Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas dimunculkan dalam Ensiklik *Quadragesimo Anno* yang mengatakan bahwa apa yang dapat dikerjakan oleh individu atau kelompok kecil, masyarakat tidak boleh mengambil alih. Setiap usaha kemasyarakatan bersifat subsidier, yaitu mendukung anggota-anggota masyarakat, bukan menghancurkannya. Lembaga masyarakat hanya memberikan bantuan untuk memberdayakan individu agar dapat melakukan tanggungjawabnya dengan baik (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 126-127).

Dasar prinsip ini adalah pengakuan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas. Selama tanggung jawab mampu diemban dengan baik oleh individu atau komunitas tersebut, individu lain dan lembaga lain tidak boleh campur tangan atau pun mengambil alih tanggung jawab.

Prinsip ini melindungi orang dari penyalahgunaan wewenang oleh lembaga yang lebih tinggi dan meminta lembaga yang sama untuk membantu individu dan komunitas di bawahnya agar dapat memenuhi kebutuhannya.

5. Keterlibatan

Implikasi dari prinsip subsidiaritas adalah keterlibatan. Keterlibatan adalah tugas setiap orang untuk ambil bagian di dalam kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab demi kesejahteraan umum. Prinsip ini mendorong keterlibatan orang-

orang yang paling tidak beruntung, sekaligus pergantian berkala para pemimpin politik dalam rangka mencegah kemapanan dan privilese yang tersembunyi (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 129-131).

Prinsip ini mendukung adanya demokrasi. Demokrasi mesti bercorak partisipatif. Warga masyarakat dalam berbagai tingkatan perlu didengarkan dan dilibatkan di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang dikerjakan.

6. Prinsip Solidaritas

Istilah “solidaritas” menunjuk pada ikatan-ikatan yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain, ruang yang diberikan kepada kebebasan manusia bagi petumbuhan bersama, di mana semua orang berbagi dan berperan serta. Prinsip solidaritas menunjukkan sifat sosial dari pribadi manusia, kesetaraan semua orang dalam martabat dan hak-haknya, serta jalan bersama individu-individu dan bangsa-bangsa menuju kesatuan (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 131-135).

Solidaritas merupakan kebajikan moral yang menjadi nyata dalam tekad untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap orang bertanggung jawab atas semua orang. Ada ikatan yang erat antara solidaritas dan kesejahteraan umum, antara solidaritas dan tujuan universal harta benda, antara solidaritas dan kesetaraan di antara semua manusia dan bangsa, antara solidaritas dan perdamaian dunia.

Pada kenyataannya terjadi jurang yang dalam antara golongan kaya dan golongan miskin, antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Maka berdasarkan prinsip ini, struktur-struktur dosa yang menguasai relasi antarpribadi dan antarnegara perlu diatasi.

7. Nilai-nilai Dasar Kehidupan Sosial

Semua nilai sosial melekat dalam pribadi manusia, berguna untuk memacu perkembangan manusia yang sejati. Nilai-nilai itu adalah: kebenaran, kebebasan, keadilan dan cinta kasih.

a. Kebenaran

Setiap orang berhak untuk mengetahui kebenaran, wajib menghormatinya dan bertanggung jawab untuk bersaksi tentangnya. Masyarakat yang berlandaskan kebenaran akan tertata dengan baik dan bersepadanan dengan martabat manusia sebagai pribadi. Kebenaran menuntut adanya transparansi dan kejujuran (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 136-137).

b. Kebebasan

Sebagai citra Allah manusia memiliki hak kodrati untuk diakui sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan merupakan tanda dan lambang martabat manusia yang paling luhur. Kebebasan tidak diartikan bahwa manusia boleh bertindak sewenang-wenang atau sebebas-bebasnya. Kebebasan selalu dipahami dalam relasi antar manusia berdasarkan kebenaran dan keadilan. Kebebasan menuntut pertanggungjawaban. Paham tentang kebebasan menjadi semakin mendalam ketika harus dibela.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengupayakan kebenaran dan menyatakan pendapat serta berprakarsa di bidang agama, budaya, sosial, ekonomi dan politik. Di samping itu, orang juga mempunyai kebebasan untuk menolak yang negatif secara moral, segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan pribadi, keluarga dan masyarakat. Semuanya ditempatkan dalam kerangka hukum, tatanan publik dan demi kesejahteraan umum (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 138-139).

c. Keadilan

Keadilan diartikan sebagai kehendak untuk memberikan kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka. Secara subjektif keadilan berarti kehendak untuk mengakui orang lain sebagai pribadi. Secara objektif keadilan merupakan kriteria yang paling menentukan dari moralitas dalam hubungan antarpribadi dan masyarakat (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 139-141).

Dalam konteks ajaran sosial Gereja, perhatian diberikan pada *keadilan sosial*, yaitu keadilan yang mengatur relasi-relasi sosial berdasarkan ketaatan kepada hukum. Keadilan sosial menyangkut masalah-masalah sosial seluas dunia di bidang sosial, ekonomi dan politik, terutama dimensi struktural dari berbagai masalah beserta jalan keluarnya masing-masing. Keadilan menjadi penting ketika nilai pribadi manusia, martabat dan hak-haknya serius terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan dan kepemilikan. Nilai keadilan berkaitan erat dengan solidaritas. Solidaritas adalah jalan menuju perdamaian. Maka perdamaian tercapai dengan melaksanakan keadilan sosial dan internasional serta membangun solidaritas.

d. Cinta Kasih

Cinta kasih adalah sumber dari nilai kebenaran, kebebasan dan keadilan. Maka cinta kasih merupakan kriteria tertinggi dan universal dari keseluruhan etika sosial. Untuk menanggapi masalah-masalah sosial diperlukan jalan yang ditandai oleh cinta kasih. Kehidupan berbuah kebaikan ketika dilandasi dengan kebenaran, dihayati dalam keadilan, dan diwujudkan dalam kebebasan. Cinta kasih mengandaikan dan melampaui keadilan. Cinta kasih menjiwai interaksi sosial dan menggerakkannya menuju perdamaian. Cinta kasih merupakan daya kekuatan yang mengilhami cara-cara baru untuk mendekati berbagai persoalan dunia dewasa ini dengan membarui berbagai struktur, organisasi

sosial dan sistem perundang-undangan. Ini yang disebut perbuatan cinta kasih sosial dan politik (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 141-143).

E. MAKNA KERJA

1. Dasar Alkitabiah

Allah menciptakan manusia menurut citra-Nya dan memberinya tugas untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk hidup (bdk. Kej. 1:28). Kekuasaan manusia atas bumi dan semua makhluk hidup ini bukan sesuatu yang sewenang-wenang, melainkan suatu undangan untuk mengolah tanah, mengusahakan dan memelihara harta benda yang diciptakan Allah (Kej. 2:5-6, 15). Harta benda ini merupakan karunia berharga yang dipercayakan Allah kepada manusia untuk diolah dan dipelihara. Dengan demikian kerja merupakan bagian dari keadaan asli manusia, mendahului kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga kerja bukan merupakan hukuman Allah (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 179-181).

Kerja mempunyai nilai tersendiri karena kerja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi syarat bagi suatu kehidupan yang layak, sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk melawan kemiskinan (Ams. 10:4). Namun orang tidak boleh jatuh ke dalam godaan menjadikan kerja sebagai berhala, karena makna kehidupan yang paling tinggi tidak ditemukan dalam kerja, melainkan di dalam Allah sendiri (Ams. 15:16).

Perintah hari Sabat mengingatkan kita akan pentingnya istirahat yang memberi peluang bagi kita untuk mengingat dan mengalami karya Allah secara baru, mulai dari Penciptaan hingga Penebusan, dan bersyukur atas hidup dan nafkah yang telah dianugerahkan Allah. Istirahat, berhenti dari kerja sejenak, membuat orang tidak menjadi budak kerja sekaligus melawan pemerasan maupun penumpukan harta.

Yesus sendiri mengajar kita menghargai kerja (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 182-184). Yesus juga bekerja membantu Yusuf ayahnya sebagai tukang kayu, ketika masih tinggal di Nazaret (bdk. Mat.13:55; Mrk. 6:3). Yesus mencela hamba yang menyembunyikan talentanya di dalam tanah (Mat. 25:14-30), dan memuji hamba yang setia dan bijaksana yang didapati Tuannya sedang melakukan tugasnya (Mat. 24:46). Yesus menerangkan misi-Nya sebagai hal bekerja: “Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga” (Yoh. 5:17), dan para murid-Nya sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan (Mat. 9:37-38). Bagi para pekerja berlaku prinsip umum “seorang pekerja patut mendapat upahnya” (Luk. 10:17). Yesus juga mengingatkan agar manusia tidak diperbudak oleh kerja. Orang harus peduli dengan jiwanya, memperoleh seluruh dunia bukanlah tujuan hidupnya (Mrk. 8:36). Harta surgawi hendaknya tetap menjadi perhatian utama (Mat. 6:19-21). Maka kerja jangan sampai menjadi sumber kecemasan (Mat. 6:25,31,34).

Yesus sendiri selama pelayanan-Nya bekerja tiada henti melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan untuk membebaskan manusia dari penyakit, penderitaan dan kematian. Yesus mempraktikkan persaudaraan sejati dan berbagi kasih melalui pelayanan-Nya itu. Dengan menegaskan bahwa hari Sabat adalah milik-Nya (Mat. 12:9-14; Mrk. 2:27-28), Yesus memberi kerja maknanya yang paling mulia, yaitu mengarahkan orang menuju Sabat abadi, ketika istirahat akan menjadi perayaan pesta yang menjadi kerinduan setiap manusia. Dengan demikian kerja merupakan peresmian ciptaan baru di dunia ini. Dalam persatuan dengan Yesus, orang yang bekerja dengan gembira, tanpa mengeluh keras dan sulitnya kerja, serta mau memikul salibnya setiap hari, bekerja sama dengan Yesus dalam karya penebusan-Nya. Kerja, dengan demikian merupakan keterlibatan manusia dalam tindakan penciptaan sekaligus tindakan penebusan.

Kerja merupakan kewajiban. Tidak ada orang yang mempunyai hak untuk tidak bekerja atau hidup atas tanggungan orang lain (bdk. 2Tes. 3:6-12). Rasul Paulus memerintahkan semua orang untuk menjadikan kerja sebagai suatu kehormatan agar tidak bergantung pada siapa pun (1Tes. 4:12), dan mempraktikkan solidaritas dengan berbagi-bagi hasil kerja dengan orang yang berkekurangan (Ef. 4:28). Dengan kerja kita mampu meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Martabat Kerja

Kerja merupakan ungkapan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2009: 188-198). Kerja manusia mempunyai dua dimensi: objektif dan subjektif. Secara objektif, kerja merupakan sejumlah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau pun mengolah bumi. Secara subjektif, kerja adalah kegiatan pribadi manusia yang mampu melaksanakan tindakan kerja sesuai dengan panggilan pribadinya sebagai citra Allah. Sebagai pribadi, manusia menjadi subjek kerja. Dimensi subjektif kerja harus ditempatkan lebih dahulu dari dimensi objektifnya, karena dimensi pribadi menentukan mutu dan nilai pelaksanaannya.

Kerja manusia tidak hanya berasal dari pribadi, tetapi juga diatur menuju dan memiliki sasaran pada pribadi manusia. Dengan demikian kerja juga memiliki dimensi sosial, yaitu dilakukan bersama orang lain dan untuk orang lain. Bekerja berarti berbuat sesuatu untuk orang lain. Hasil kerja memberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan orang lain.

Kerja, oleh karena faktor subjektifnya, lebih unggul dari semua faktor lainnya yang berkaitan dengan produksi, khususnya modal. Kerja memiliki prioritas atas modal, karena dalam proses produksi kerja merupakan penyebab utama, sedangkan modal merupakan sarana produksi. Dengan demikian para pekerja mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam kepemilikan, pengelolaan dan laba.

Beristirahat dari kerja adalah hak setiap pekerja. Sebagaimana Allah beristirahat pada hari ketujuh, demikian pula manusia yang diciptakan menurut citra Allah memiliki hak untuk beristirahat yang memungkinkannya untuk mengurus kehidupan keluarga, budaya, sosial dan agamanya.

3. Kerja sebagai Partisipasi dalam Karya Allah

Dalam *Katekismus Gereja Katolik* ditegaskan bahwa dengan kerja manusia bekerja sama dengan Allah demi penyempurnaan ciptaan (KGK 378). Sewaktu bekerja, manusia menggunakan sekaligus mengembangkan kemampuan kodratnya. Nilai utama dari kerja datang dari manusia sendiri yang menciptakannya dan yang menerima keuntungannya (KGK 2428). Dengan bekerja diharapkan setiap orang dapat menghasilkan sarana-sarana untuk memelihara diri sendiri dan keluarganya serta supaya ia dapat menyumbang sesuatu bagi kesejahteraan umum.

Pekerjaan diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk pekerjaan (bdk. *Laborem Exercens* 6). Pekerjaan dimaksudkan Tuhan untuk menguduskan manusia. Kerja tidak dapat dipisahkan dari manusia yang diciptakan menurut citra Allah, sebab Allah melibatkan manusia untuk meneruskan karya penciptaan-Nya, demi kesejahteraannya sendiri dan sesamanya. Perintah untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk hidup (bdk. Kej. 1:28) diartikan sebagai perintah untuk memelihara alam semesta, mengolah dan mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi manusia. Kekuasaan manusia atas alam semesta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi dengan tetap memeliharanya dan menghindari dari perusakan lingkungan hidup. Itulah makna berpartisipasi dalam karya Allah.

Sebagaimana Yesus yang selalu bekerja demi keselamatan orang banyak, kita pun dipanggil untuk melanjutkan karya keselamatan Allah itu. Secara khusus Yesus memilih orang kecil, orang miskin dan tersingkir dalam pelayanan-Nya, maka kita

pun diharapkan memperhatikan dan membela orang kecil, orang miskin dan tersingkir, yang menjadi korban di dalam masyarakat. Misalnya saja, kita perlu membela kaum buruh agar mereka mendapatkan hak mereka atas upah yang adil. Pembebasan orang kecil dari penindasan termasuk bentuk keselamatan yang diwartakan Yesus.

Pertanyaan Reflektif:

1. Pada zaman sekarang, orang lebih suka menyibukkan diri sendiri dengan bermain *gadget* untuk mendengarkan musik, main *games*, ber-SMS ria, atau sekedar *browsing internet*, sehingga tidak lagi peduli pada orang lain. Orang menjadi egois, kurang mau bersosialisasi. Bagaimana aku menanggapi situasi ini?
2. Apa bentuk keterlibatanku di dalam menanggapi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitarku?
3. Permasalahan sosial apa saja yang terjadi di Indonesia?
4. Manakah ajaran sosial Gereja yang relevan dengan situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik di Indonesia?
5. Bagaimana aku memaknai kerja atau belajarku selama ini?

F. PENUTUP

Gereja mendapat perintah dari Yesus sendiri untuk melanjutkan karya keselamatan Allah, ikut serta membangun Kerajaan Allah di dunia ini. Secara konkret Gereja ikut serta bertanggung jawab menciptakan perdamaian, kerukunan dan persaudaraan. Gereja bertugas membuat dunia menjadi lebih nyaman dihuni. Di tengah-tengah situasi ketidakadilan sosial, Gereja bertugas mewujudkan keadilan, membela kaum lemah, membela korban penindasan. Kita sebagai anggota Gereja diharapkan merealisasikan tugas Gereja itu di dalam hidup kita sehari-hari dengan melakukan hal-hal

sederhana sebagai ungkapan tanggung jawab sosial kita di dalam masyarakat.

KEPUSTAKAAN

Aman, Petrus Kanisius, OFM. *The Church as A Moral Community and Its Role to Promote Justice, Peace and The Integrity of Creation in The Light of Gaudium et Spes* 40-45. Roma: Pontificia Universitas Lateranensis.

Hardawiryana, Robert, SJ. 1992. "Mengikuti Kristus – Mewartakan Kerajaan Allah." Dalam *Bunga Rampai Katekese Sosial*. Jakarta: Penerbit Obor. Hlm. 52-73.

Katekismus Gereja Katolik. 2007. Penerjemah: P. Herman Embuiru. Ende: Penerbit Nusa Indah. Dokumen asli diterbitkan tahun 1993.

Kieser, Bernhard, SJ. 1992. "Isi dan Orientasi Ensiklik-ensklik Sosial: Rerum Novarum sampai dengan Sollicitudo Rei Socialis." Dalam *Bunga Rampai Katekese Sosial*. Jakarta: Penerbit Obor. Hlm. 187-213.

Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. 2009. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Penerbit Ledalero.

Rahner, Karl. Ed. 1986. *Encyclopedia of Theology: The Concise Sacramentum Mundi*. New York: The Crossroad Publishing Company.

SUMBER INTERNET:

Armada Riyanto, CM. *Selintas tentang Dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja*. Dalam http://www.imankatolik.or.id/ajaran_sosial_gereja.html, diakses pada 10 Januari 2014.